

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Balai KIPM Lampung

PRAKATA

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Lampung Tahun 2024 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai KIPM Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2024 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai KIPM Lampung . Secara umum seluruh indikator kinerja Balai KIPM Lampung yang diukur pada Tahun 2024 ada yang telah mencapai bahkan melebihi target Tahun 2024. Capaian kinerja positif IKU Balai KIPM Lampung Pada Tahun 2024 antara lain adalah Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Lampung. Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Penyelesaian temuan BPK, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

untuk perbaikan kinerja, Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa. tingkat kepatuhan BMN.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai KIPM Lampung atas tersusunnya.

Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 17 Januari 2025

Balai KIPM Lampung



Ashari Syarief.S.Pi.M.P

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (Balai KIPM Lampung), Badan Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Badan KIPM) rencana kinerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Untuk mencapai Sasaran Kinerja tersebut, pada tahun 2024 Balai KIPM Lampung menetapkan 3 Sasaran Strategis (SS) dengan 14 Indikator Kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sasaran Strategis tersebut adalah 1) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu hasil Kelautan Perikanan 2). Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar, dan 3). Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Balai KIPM Lampung melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik (Triwulanan).

Jumlah Sasaran Strategis yang dapat diukur sebanyak 3 buah yang merupakan indikator pada SS-1 sampai dengan SS-3. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian Skor Kinerja IKU Tahun 2024 adalah 114,81 atau masuk dalam kriteria Istimewa (Biru). Secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur dan dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Capaian Kinerja BKIPM Lampung Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	
				2024	2024	%
SK 1.1	Terselenggara nya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sector produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70	100	120
		2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sector Produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung(%)	70	100	120
		3	Persentase Pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70	100	120
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung	99	100	101
SK 2.1	Terselenggara nya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70	83,10	83,10
SK 3.1	Terselenggaranya Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Balai KIPM Lampung	6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Lampung (indeks)	3,36	3,65	108
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Indeks)	86	87,29	101
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Lampung	82	82,70	100
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	71	86,67	120

10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	93,76	93,88	100
11	Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Lampung	100	100	100
12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Lampung (%)	80	98,11	120
13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	80	84,34	105
14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	80	97,50	120

Adapun dari anggaran, Triwulan IV pada Tahun 2024 Balai KIPM Lampung telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 7.099.573.801,- atau 97.27% dari PAGU yang dikelola sebesar Rp.7.099.494.000,-. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Tahun 2024 BKIPM Lampung secara umum cukup memuaskan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian.

OM-SPAN

STASIUN KARANTI...
T.A. 2024

halchoi

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	649615 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	PAGU	4.578.669.000	2.719.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.298.494.000
		REALISASI	4.524.009.463 (98.81%)	2.575.564.338 (94.70%)	0	0	0	0	0	0	0	0	7.099.573.801 (97.27%)
		SISA	54.659.537	144.260.662	0	0	0	0	0	0	0	0	198.920.199
GRAND TOTAL		PAGU	4.578.669.000	2.719.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.298.494.000
		REALISASI	4.524.009.463 (98.81%)	2.575.564.338 (94.70%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	7.099.573.801 (97.27%)
		SISA	54.659.537	144.260.662	0	0	0	0	0	0	0	0	198.920.199

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIPRAKATA.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. AGENDA BALAI KIPM LAMPUNG	6
E. DASAR PENGUKURAN KINERJA.....	7
F. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA	7
G. RUANG LINGKUP.....	7
H. WAKTU PENGUKURAN KINERJA	7
I. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA.....	8
J. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB 2	9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS BKIPM DAN BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2020 - 2024.....	9
1. Visi KKP dan Badan KIPM KKP	9
2. Misi Balai KIPM Lampung	10
3. Tujuan Balai KIPM Lampung.....	10
4. Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung	11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	12
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024.....	12
D. KEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL BALAI KIPM Lampung.....	15
E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU/ IK.....	17
BAB 3	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. PENGELOLAAN KINERJA BALAI KIPM Lampung	18
B. CAPAIAN KINERJA.....	18
3.1. Realisasi Anggaran.....	63
3.2. Efisiensi Anggaran.....	64

C.	ANALISIS CAPAIAN KINERJA TA 2024 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	66
D.	ANALISIS PELAKSANAAN BELANJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	68
	BAB 4 PENUTUP	69
A.	KESIMPULAN	69
B.	PERMASALAHAN	69
C.	LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)	70
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja BKIPM Lampung Tahun 2024	v
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024	11
Tabel 2. 2 Tabel Penetapan Kinerja Balai KIPM Lampung TA 2024	14
Tabel 3. 1 Rentang Penilaian Capaian Kerja	21
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2024	22
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi IK1 Tahun 2024	27
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi IK2 Tahun 2024	29
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi IK3 Tahun 2024	30
Tabel 3. 6 Target dan Realisasi IK4 Tahun 2024	32
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi IK 5 Tahun 2024	34
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi IK 6 Tahun 2024	35
Tabel 3. 9 Target dan Realisasi IK 7 Tahun 2024	36
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi IK 8 Tahun 2024	38
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi IK 9 Tahun 2024	39
Tabel 3. 12 Target dan Realisasi IK 10 Tahun 2024	42
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi IK 11 Tahun 2024	43
Tabel 3. 14 Target dan Realisasi IK 12 Tahun 2024	44
Tabel 3. 15 Target dan Realisasi IK 13 Tahun 2024	45
Tabel 3. 16 Target dan Realisasi IK 14 Tahun 2024	46
Tabel 3. 21 Data Anggaran	65
Tabel 3. 22 Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode Triwulan Tahun 2024	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Lampung	4
Gambar 3. 1 Dashboard Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2024.....	19
Gambar 3. 2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Balai KIPM Lampung...	40

BAB 1 PENDAHULUAN

- **LATAR BELAKANG**

Sebagai upaya mendukung Visi nasional kita " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" melalui Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia yang diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan tingkat reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan Negara.

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan yang baik salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Selaras dengan fungsinya Badan KIPM menyelenggarakan fungsi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan, sebagai aparat ASN seluruh pegawai BKIPM dituntut untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2020-2024, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

- **DASAR HUKUM**

Balai KIPM Lampung melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Lampung memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai KIPM Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

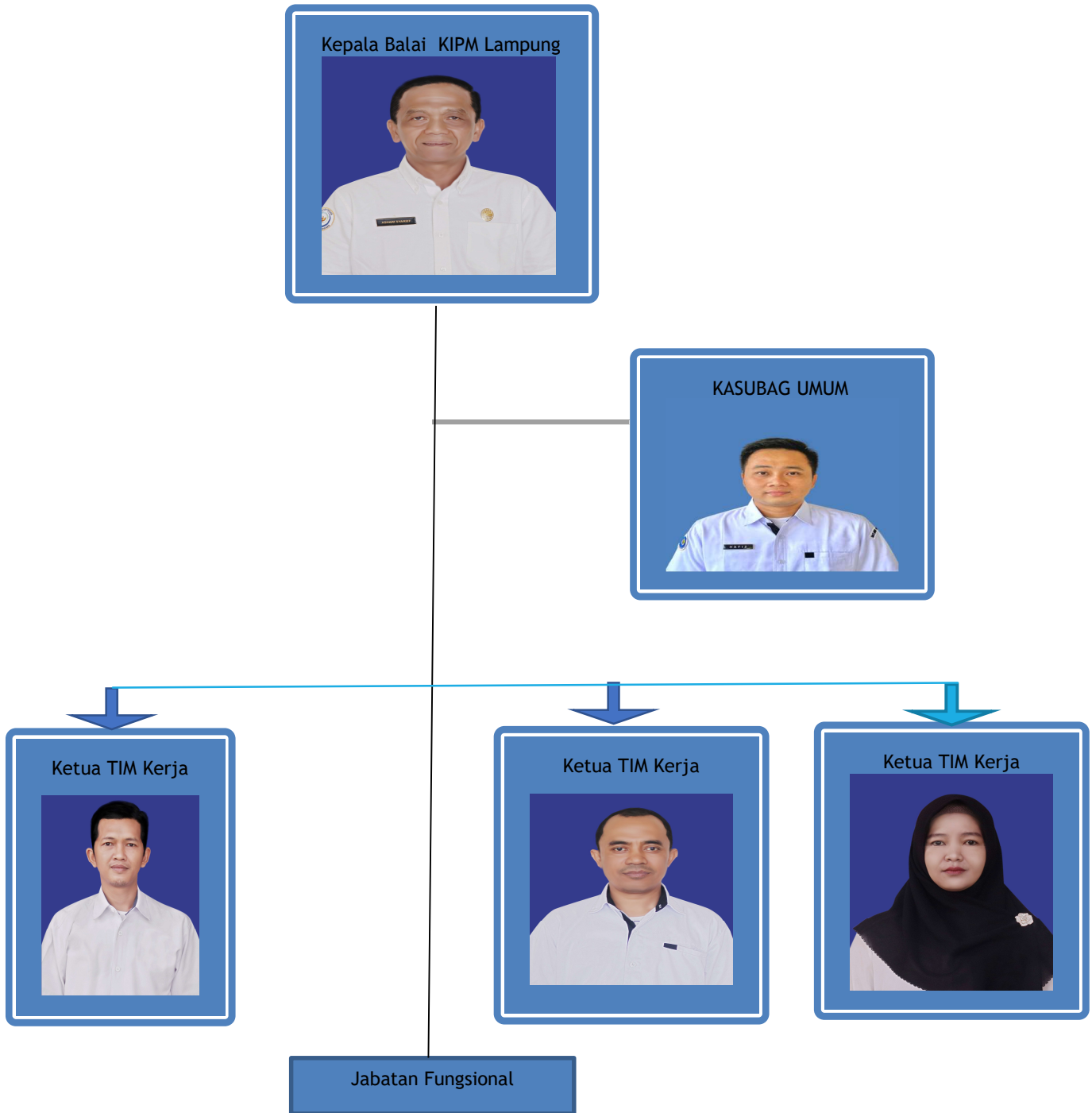
- Menyusun kebijakan teknis, rencana, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan administrasi badan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Melaksanakan pengujian terhadap mutu hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;

- Menyusun pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- Menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil perikanan.
- Mengumpulkan, pengolahan data dan informasi, pengendalian mutu, hayati ikan; dan
- Melaksanakan urusan ketatausahaan.

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Lampung

- **AGENDA BALAI KIPM LAMPUNG**

Salah satu agenda misi pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional yaitu dengan meningkatkan sistem Pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan, dengan meningkatnya peran serta Balai KIPM Lampung diharapkan mampu mencapai misi tersebut.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktiktata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai KIPM Lampung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam agenda pembangunan nasional berupa Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

• DASAR PENGUKURAN KINERJA

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/PERMEN-KP/2021 tentang
Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai KIPM Lampung Nomor : SP DIPA- 032.13.0.649615/2024 tanggal 24 November 2023.

• TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

- Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Balai KIPM Lampung sampai Tahun 2024 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
- Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan masing-masing Balai KIPM Lampung.

• RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Balai KIPM Lampung dan Perjanjian Kinerja level 2 yang disepakati Kepala Balai KIPM Lampung dengan Kepala Badan KIPM.

• WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Oktober s.d. Desember 2024
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Januari 2025

- **METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

- Pengukuran atas Sasaran Kinerja Balai KIPM Lampung sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024.
- Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 15 Januari 2025.

- **SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

- 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja;
- 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra KKP dan BKIPM, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU;
- 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Balai KIPM Lampung, Capaian Kinerja Tahun 2024, dan Realisasi Rencana Aksi Tahun 2024; dan
- 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

A.RENCANA STRATEGIS BKIPM DAN BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2020 - 2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Penyusunan Rancangan Renstra KKP 2020-2024 menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Rancangan Renstra 2020-2024 dan turunannya pada Balai KIPM Lampung sebagai bagian dari unit Eselon I di bawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. VISI KKP DAN BADAN PPMHKP KKP

Rancangan Visi KKP, adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun yang merupakan perwujudan Visi Presiden yang gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian.berlandaskan Gotong

Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Balai KIPM Lampung merancang visinya sesuai misi BPPMHKP sebagai berikut :

“Hasil Perikanan yang sehat, bermutu aman dan terpercaya untuk terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumberdaya kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.”

Visi tersebut *dilatarbelakangi* oleh adanya keinginan seluruh pegawai Badan KIPM KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP. Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

1. MISI BALAI KIPM LAMPUNG

Misi Balai KIPM Lampung dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Badan KIPM, yaitu Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Balai

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju dan mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas hama dan penyakit.

KIPM Lampung dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.



2. TUJUAN BALAI KIPM LAMPUNG

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Balai KIPM Lampung Adapun tujuan strategis Balai KIPM Lampung :

Terwujudnya Kinerja Balai KIPM Lampung yang Efektif dan Efisien;

a. Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola Balai KIPM Lampung yang Baik;

b. Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan Balai KIPM Lampung

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektivitas peran pengawasan operasional Balai KIPM Lampung. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.

Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Balai KIPM Lampung yang disampaikan di atas tertuang dalam rancangan Renstra Balai KIPM Lampung 2020-2024 yang telah ditetapkan seiring dengan penetapan Renstra BKIPM.

3. SASARAN STRATEGIS BALAI KIPM LAMPUNG

Secara keseluruhan, melaksanakan Sasaran Strategis menjadi 3 (Tiga) SS seperti disajikan pada tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS	
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.
3	Terselenggaranya Tatakelola pemerintahan yang baik

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung Tahun 2020-2024

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup BPPMHKP, Balai KIPM Lampung harus mendukung sasaran strategis pada tingkat Badan PPMHKP. Sasaran Strategis (SS) lingkup Balai KIPM Lampung merupakan mendukung capaian kinerja level Badan PPMHKP, (level 1). Selanjutnya, hal tersebut di-*cascading* ke level di bawahnya dan di-*alignment* antar staff ke seluruh pegawai Balai KIPM Lampung.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada tahun 2024, Balai KIPM Lampung melaksanakan 3 (Tiga) kegiatan utama dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp. 7.298.494.000. Ketiga kegiatan tersebut adalah :

1. Pengendalian mutu anggaran senilai Rp. 559.000.000
2. 7010 Rp.1.516.500.000
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai KIPM Lampung dengan alokasi anggaran senilai Rp 6.617.494.000

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024

Penetapan kinerja Balai KIPM Lampung TA 2024 dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Balai KIPM Lampung dengan Kepala Badan KIPM tersaji dalam Lampiran 1.sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya a <i>pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</i>	1	Persentase hasil kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan Keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	70

		2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Lampung	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung	99
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem Jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM Lampung	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Lampung (Indeks)	70
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung	86
		8	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Lampung	71
		10	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai IPM Lampung	93,76
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Lampung	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM lampung (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Lampung	80

		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	80
--	--	----	--	----

Tabel 2. 2 Tabel Penetapan Kinerja Balai KIPM Lampung TA 2024

D.KEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL BALAI KIPM LAMPUNG

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai UPT BPPMHKP lingkup KKP, Balai KIPM Lampung melaksanakan program dan kegiatan Pengendalian mutu, karantina ikan, Sistem dan Standar Kepatuhan, dan Dukungan Manajemen” dengan rincian kegiatan;

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, antara lain :

4. Operasional pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
7. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
8. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu.
9. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

C. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU/ IK

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Balai KIPM Lampung telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja. Yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Balai KIPM Lampung dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 disajikan pada tabel di Lampiran 2.

RENCANA AKSI PELAKSANAAN IKU DI BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2024																		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	SAT OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET/ OUTP KOMPONEN	TARGET OUT PUT BULANAN											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Keluaran perikanan	Persepsi kepatuhan dan kepatuhan produsen/pelaku usaha yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	Lembarge kelulusan dan pelaksanaan sektor produksi primer yang divalidasi	Penerapan Sertifikasi Produk Primer Yang di validasi	178.000.000	Persen	70												70
	Persepsi kepatuhan dan kepatuhan produsen/pelaku usaha yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point	Inspeksi dan validasi pemetaan HACCP	25.000.000	Persen	70												70
	Persepsi kepatuhan dan kepatuhan produsen/pelaku usaha yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	Monitoring kesegaran ikan,Residu dan Bahaya Berbahaya	Monitorng kesegaran ikan,Residu danBahaya Berbahaya	80.000.000	Persen	70												70
	Residu ikatan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara sesuai standar internasional UPT Balai KIPM Lampung	UPH yang konsisten memenuhi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	SURVEILAN K2 UPH DALAM RANGKA OFFICIAL CONTROL	80.000.000	Persen	99												99
	Nilai pemenuhan perjanjian dalam manajemen mutu laboratorium pengap dan Lembarge inspeksi lingkup Balai KIPM Lampung	PENASABAHAN RUANG LINGKUP PARAMETER UJI YANG TERAKREDITASI	PENASABAHAN RUANG LINGKUP PARAMETER UJI YANG TERAKREDITASI	25.000.000	Persen	70												70
Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang konsisten sesuai Standar Tata Kelola Pemerintah yang baik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Lampung	Layanan Umum	Layanan Umum	4.000.000	Indeks	3,36												3,36
	Indeks Profesional ASN Lingkup Balai KIPM Lampung	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	4.324.049.000	Indeks	84												84
	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Sektor Balai KIPM Lampung	Layanan Perkantoran	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7.000.000	Nilai	82												82
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BIKPM Lingkup Balai KIPM Lampung	Layanan Perkantoran	Layanan Manajemen Keuangan	31.495.000	Nilai	71												71
	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Lampung	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	41.424.000	Nilai	93,76												93,76
	Penyelesaian Temuan BPKP Lingkup Balai KIPM Lampung	Layanan Perkantoran	Layanan Manajemen SDM	26.948.000	Nilai	100												100
	Presensi Pegawai yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Lampung (%)	Layanan Perkantoran	Layanan Penyelenggaraan Keasrian	4.000.000	Nilai	80												80
	Tingkat Kepuasan Pengadaan Barang		Pengadaan			80												80
	Jawa BIKPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	Pengadaan			Persen													
	Tingkat Kepuasan Pengelolaan BMN BIKPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	Layanan Internal	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	207.290.000	Persen	80												80

Bandar Lampung, 2 Oktober 2024
Kepala Balai KIPM Lampung

Ashari Syarif, S.Pd, M.P
NIP.196905151995031002

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA BALAI KIPM LAMPUNG

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Balai KIPM Lampung membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing bagian di Balai KIPM Lampung untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap Tri wulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis *website* di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Kode Warna	Keterangan
1.	Istimewa	Nilai 110 - 120
2.	BAIK	Nilai 90 - < 110
3.	CUKUP	Nilai 70 - < 90
4.	Kurang	Nilai 50 - < 70
5.	Sangat Kurang	Belum Input Capaian
6.	Belum ada Penilaian	

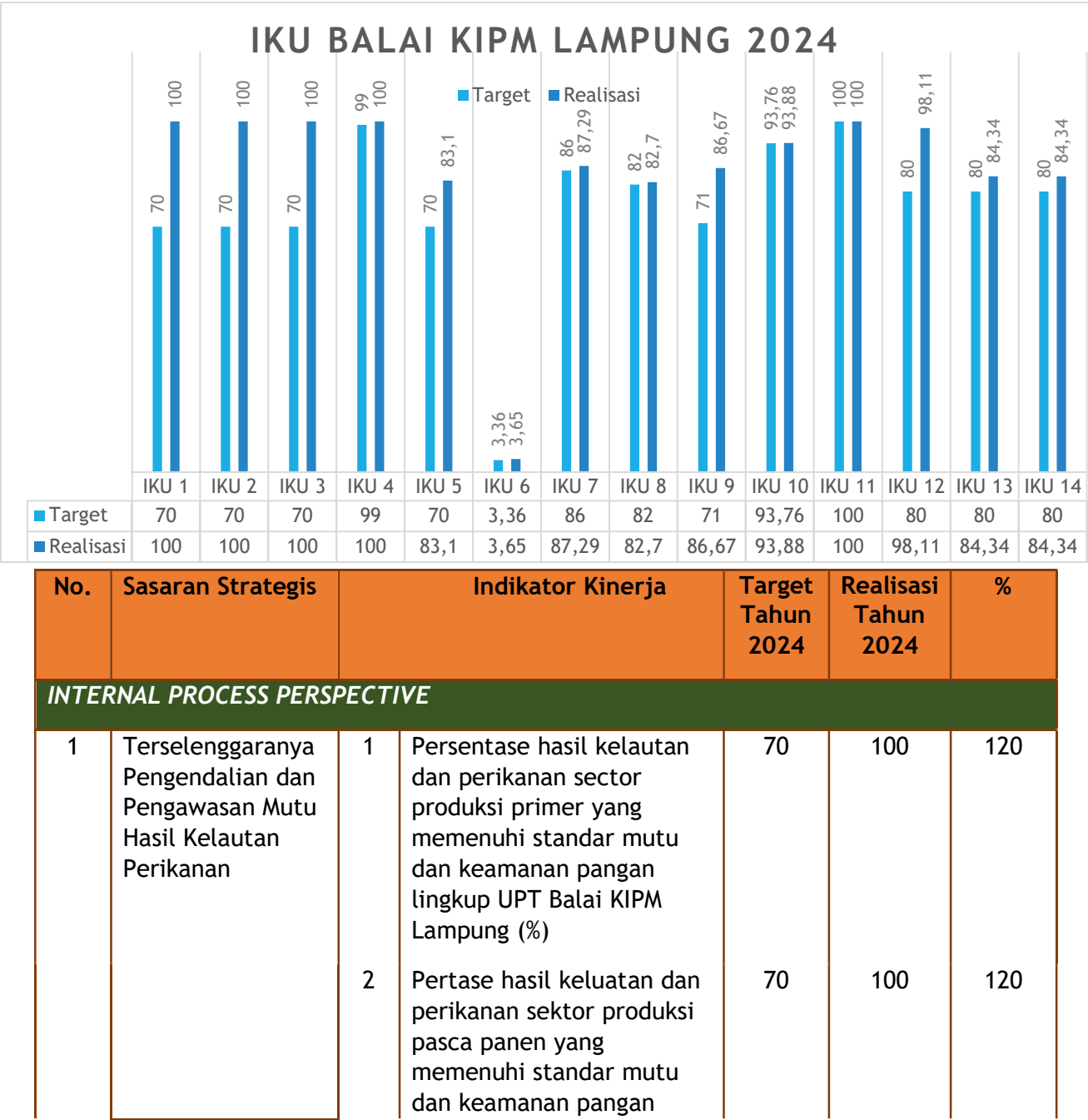
Tabel 3. 1 Rentang Penilaian Capaian Kerja

Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Kinerja Balai KIPM Lampung tahun 2024 terdiri dari 3 (Tiga) SS yang diukur keberhasilannya melalui capaian 14 IKU/IK dengan target yang ditentukan.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Balai KIPM Lampung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Capaian kinerja yang diukur per Triwulan pada Tahun 2024

untuk Level 1 (Badan KIPM) terdiri dari capaian kinerja pada 3 (Tiga) dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan dari 14 IKU/IK. Target SS dan IKU Balai KIPM Lampung yang diukur pada Tahun 2024 menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya tahun 2024. Target SS dan IKU Balai KIPM Lampung Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.



			lingkup UPT Balai KIPM Lampung			
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan diwilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Lampung	70	100	120
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung	99	100	111
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		%
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan Keamanan Hasil Peranan Secara Profesional dan Partisipatif	5	Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	70	83,10	118
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		%
4	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Lampung	3,36	3,65	108
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung	86	87,29	101
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP satker lingkup UPT Balai KIPM Lampung.	82	82,70	100
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	71	86,67	100

		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	93,76	93,88	100
		11	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	100	100	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Lampung	80	98,11	100
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai KIPM Lampung	80	84,34	105
		15	Tingkat Kepatuhan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung	80	97,50	120

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2024

Unit Kerja

Tahun

1024000000 - BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN...

2024



Capaian Kinerja IKU

	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4	s/d TW4
Skor Capaian	113,48 Q	110,62 Q	110,62	116,22 Q	116,22	114,15 Q	114,15
Skor Verifikasi		108,62 Q	108,62	116,22 Q	116,22	114,15 Q	114,15

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Pada gambar diatas, Nilai capaian kinerja IKU mencapai nilai 114,81. Sedangkan capaian kinerja IKU dan IK secara keseluruhan ditunjukkan melalui skor kinerja sebesar 114,81 yang masuk dalam kriteria Istimewa (Biru).

Hasil dari capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU/ IK, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 14 (Empat Belas) IKU yang diukur pada Tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Perlu disampaikan bahwa capaian kinerja SS dihasilkan dari kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja (IK) yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan SS tersebut. Capaian kinerja masing-masing Indikator dari masing-masing SS dan IKU/IK dapat disampaikan sebagaimana berikut.

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

IK 1

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Lampung

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir dan sebagai Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

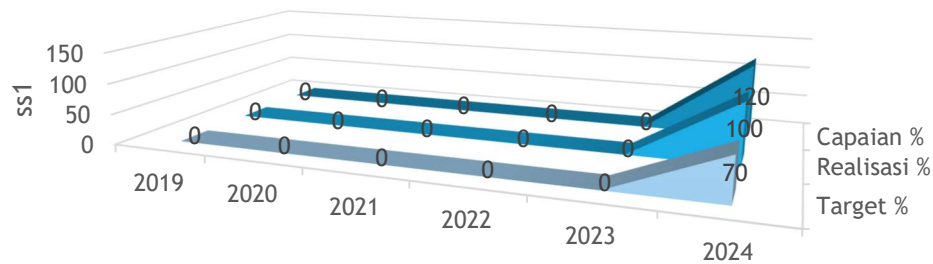
Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai enam standar dan acuan layanan untuk sertifikasi produk perikanan Primer.terdiri dari :

1. Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)
2. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
3. Cara Penanganan Ikan yang Baik diatas Kapal (CPIB kapal)
4. Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
5. Cara Pembuatan obat ikan yang baik (CPOIB)
6. Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Melalui sertifikasi standar dan acuan layanan produk kelautan dan perikanan. Diharapkan itu bisa meningkatkan komitmen untuk senantiasa menjaga mutu dankualitas setiap produk kelautan dan perikann yang ada di Indonesia terkhusus untuk keperluan ekspor.. Data perbandingan antara target Tahun 2024 serta Realisasinya dibandingkan dapat dilihat pada



IK 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Lampung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target %	0	0	0	0	0	70
Realisasi %						100
Capaian %						120

Target % Realisasi % Capaian %

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi IK 1 pada Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 masih di 100%.

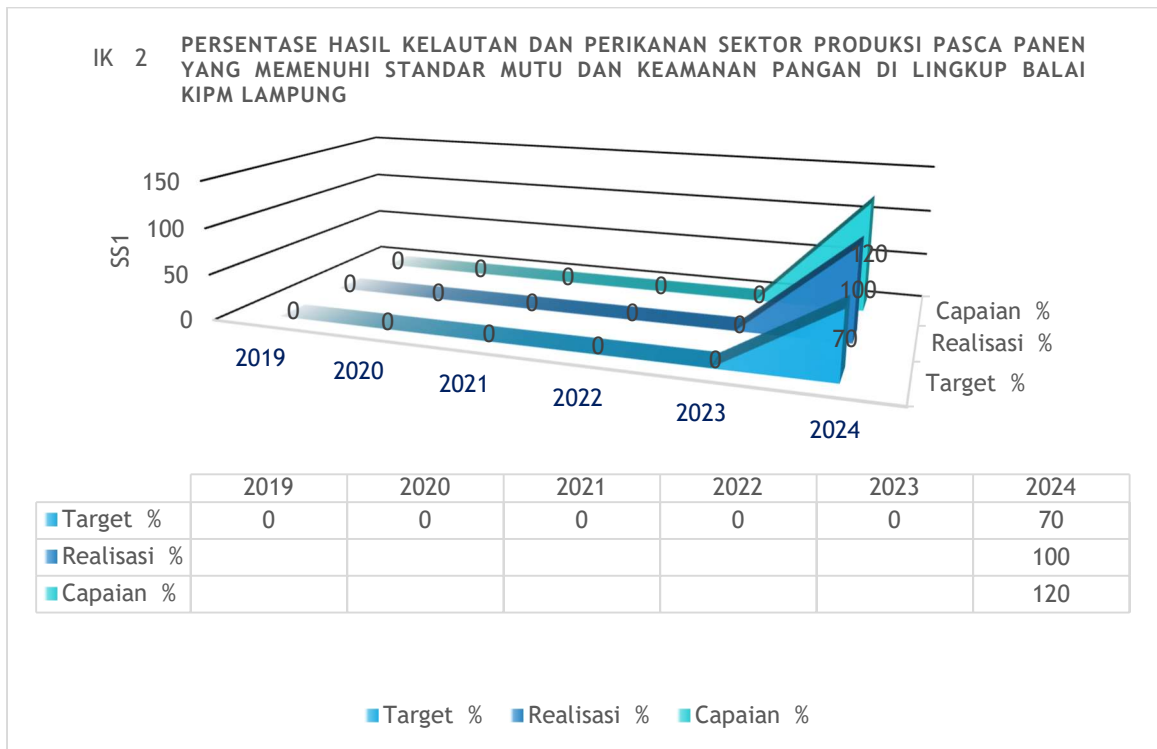
Pencapaian indikator ini pada tahun 2024 dapat dinyatakan sebesar 120%. Balai KIPM Lampung Terealisasi 2 unit yang dapat sertifikat CPPIB Yaitu PT. Suri Tani Pemuka.PT. Central pertiwi Bahari.dan sertifikat cara budi daya ikan yang baik (CBIB) yaitu Andi Riza Farm .Sehingga capaiannya Tahun 2024 sebesar 100% sedangkan kegiatan sektor produksi primer Tahun 2023 belum ada.

IK 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di Lingkup Balai KIPM Lampung

Persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini semakin ketat dalam rangka pemenuhan pasar nasional maupun Internasional. Balai KIPM Lampung telah melaksanakan kegiatan quality Assurance pada kegiatan penjaminan produk pasca panen diantaranya HACCP dan sertifikasi HC. Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik di lingkup Balai KIPM Lampung merupakan implementasi dari INPRES No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat.

Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung. Data perbandingan antara target Tahun 2024 serta Realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2.





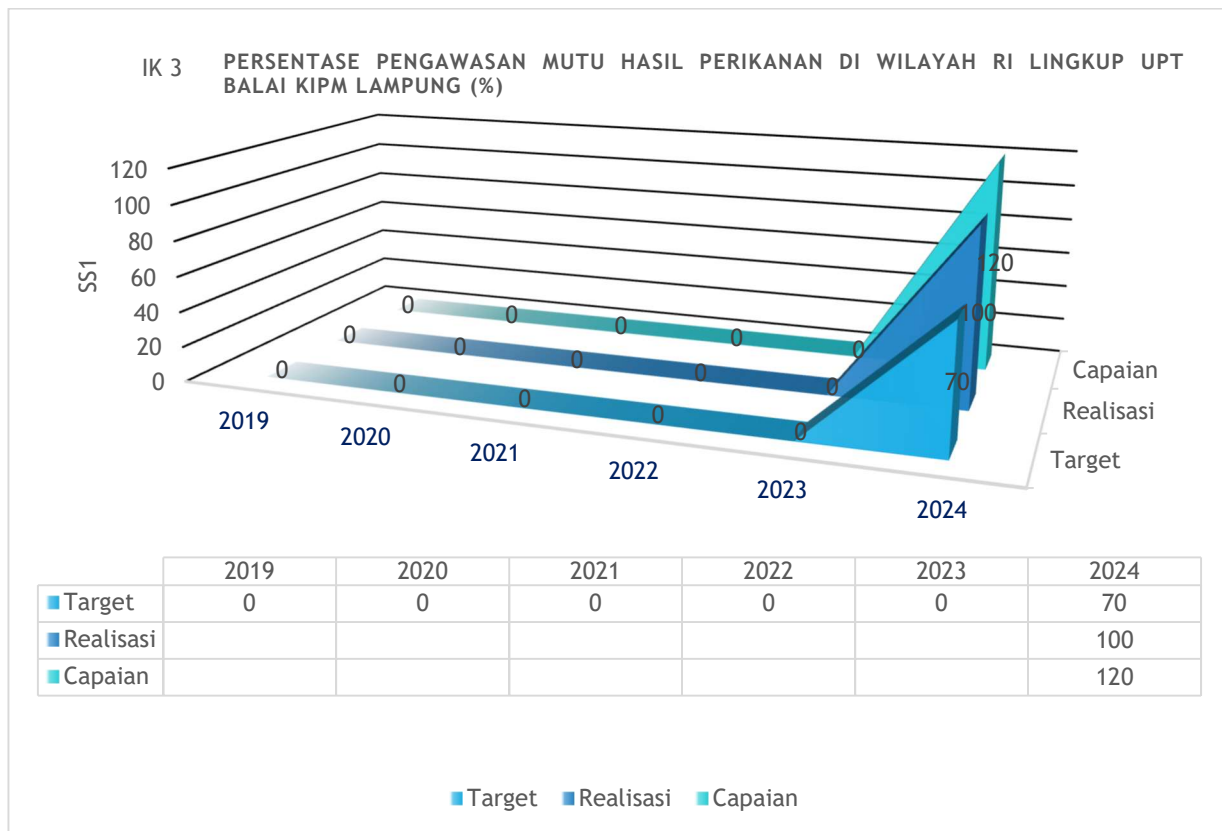
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi IK 2 pada Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 masih 100%.

Pencapaian indikator ini pada tahun 2024 dapat dinyatakan sebesar 100%. Balai KIPM Lampung Menargetkan 6 Lokasi terdiri dari :

1. Kota Bandar Lampung (Psr Modern Chandra,Psr Modern Galael,Psr Tradisional Panjang, Psr Tradisional Way Halim,TPI/PPI Lempasing,Psr Tradisional Sukarame)
 2. Kota Metro (Psr Tradisional Metro,Psr Modern Chandra Metro)
 3. Kab. Lampung Selatan (Psr Tradisional Natar,Psr Modern Chandra Natar ,TPI/PPI Rangai,Psr Tradisional Kalianda,TPI/PPI Kalianda)
 4. Kab. Tanggamus (TPI/PPI Kota Agung, Psr Tradisional Gisting)
 5. Kab.Lampung Timur (Psr Tradisional Way Jepara,TPI/PPI Labuhan Maringgai, TPI/PPI Kuala Penet)
 6. Kab.Pringsewu (Psr Tradisional Pringsewu,Psr Modern Chandra Pringsewu)
- Sehingga capaiannya Tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian Tahun 2023

Pengawasan mutu hasil perikanan sebuah proses untuk memastikan bahwa produk perikanan memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan hasil perikanan. Mutu hasil perikanan yang baik meningkatkan keuntungan ekonomi bagi nelayan dan pedagang. Sistem jaminan dan keamanan hasil kelautan dan perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai pemasaran. Data perbandingan antara target Tahun 2024 serta Realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.3. Pencapaian indikator ini pada tahun 2024 dapat dinyatakan sebesar 100%.



Tabel 3. 5 Target dan Realisasi IK 3 pada Tahun 2024



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BPPMHKP LAMPUNG

01 JULI 2024

BRING SAFETY THROUGH QUALITY

Pengendalian dan Pengawasan Mutu

25 KKP
1/2

PEMERIKSAAN EKSPOR PRODUK PERIKANAN



BPPMHKP

10:43 Mon 07-01-2024

PSHO+PRX

5.270954°S, 105.189797°E

Overcast 28°C

Verified by Marki



BPPMHKP

10:39 Mon 07-01-2024

PSHO+PRX

5.270954°S, 105.189797°E

Overcast 28°C

Verified by Marki

@bppmhkp Lampung

Marki
#2024
KKP BEYOND



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

25 KKP



BPPMHKP PEMERIKSAAN EKSPOR MEDIA PEMBAWA PERIKANAN

Phillips Seafoods Indonesia
Lampung Plant

Waktu & lokasi: divifikasi oleh Marki

10:38
05-2024

Phillips Indonesia

divifikasi oleh Marki

Marki
Waktu & lokasi



BPP
MHKP

STOP
GRATIFIKASI

STOP
PUNGTLI

MEK-SIDETV

#2024
KKP BEYOND

IK 4

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan merupakan perbandingan antar jumlah ikan dan hasil perikanan yang tersertifikasi dan volume yang diekspor ke pasar Internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor. Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Target serta Realisasinya Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4



Tabel 3.6 Target dan Realisas IK 4 pada Tahun 2024

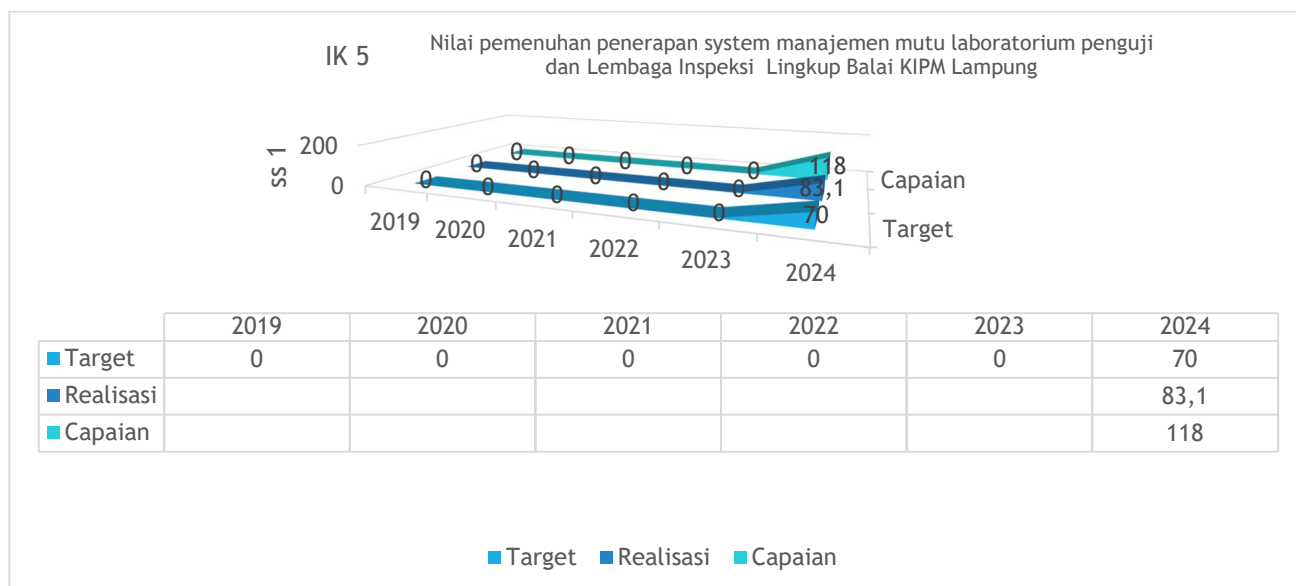


Penerapan sistem jaminan mutu di laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi dapat meningkatkan kualitas layanan dan produk. Sistem jaminan mutu juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi lembaga. Salah satu standar yang digunakan untuk menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium adalah ISO 17025. penerapan ISO 17025 dapat memberikan banyak manfaat. seiring untuk peningkatan keandalan hasil pengujian dan kalibrasi. Kualitas pengelolaan manajemen dan mengurangi risiko kesalahan dan pengulangan dalam proses pengujian.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Data perbandingan antara target Tahun 2024 serta Realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.7

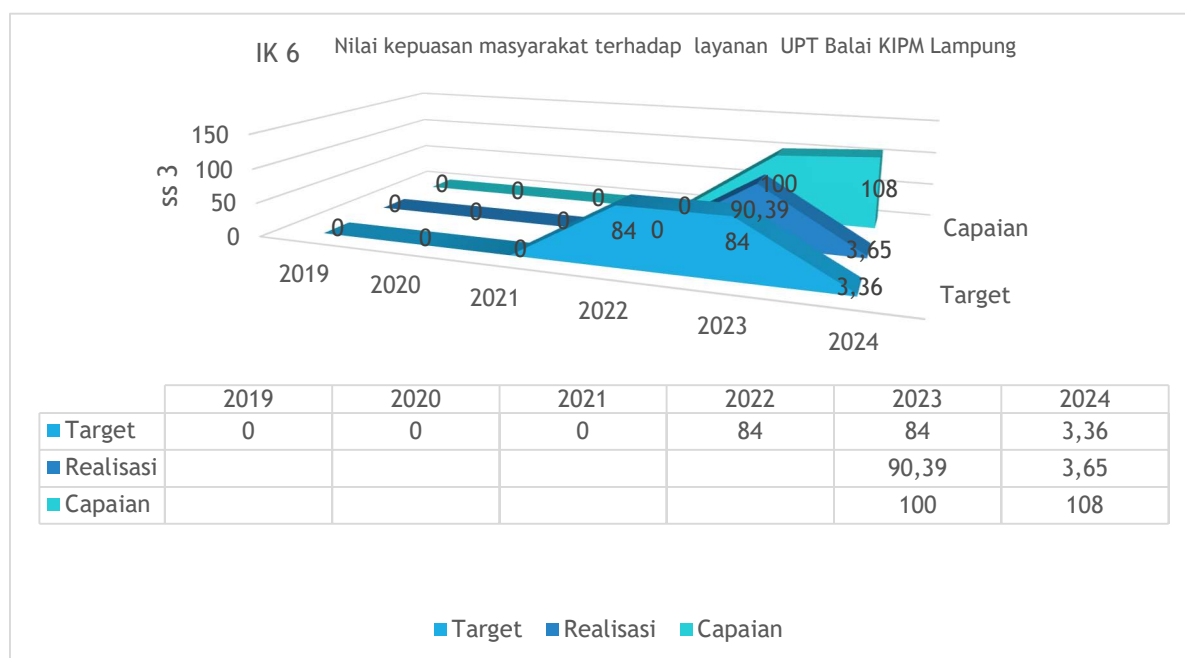




Tabel 3.7 Target dan Realisasi IK 5 pada Tahun 2024

IK 6 Nilai kepuasan masyarakat Terhadap layanan di UPT Balai KIPM Lampung

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung (nilai) merupakan indikator utama Balai KIPM Lampung dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Balai KIPM Lampung.



Tabel 3. 9 Target dan Realisasi IK 6 pada Tahun 2024

No.	UPT	Jumlah Responden	Rata-rata (Rata-rata/ unsur)	SKM	Nilai Pelayanan	Kinerja UPP
21	Stasiun KIPM Cirebon	54	3.81	95.32	A	Sangat Baik
22	Stasiun KIPM Kendari	35	3.81	95.24	A	Sangat Baik
23	Stasiun KIPM Bengkulu	15	3.80	95	A	Sangat Baik
24	Stasiun KIPM Bima	32	3.80	94.97	A	Sangat Baik
25	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	64	3.78	94.62	A	Sangat Baik
26	Balai Besar KIPM Makassar	404	3.77	94.2	A	Sangat Baik
27	Balai KIPM Entikong	32	3.76	94.1	A	Sangat Baik
28	Balai KIPM Tarakan	6	3.76	93.98	A	Sangat Baik
29	Stasiun KIPM Palangkaraya	35	3.76	93.97	A	Sangat Baik
30	Balai KIPM Manado	45	3.74	93.46	A	Sangat Baik
31	Stasiun KIPM Palembang	67	3.73	93.33	A	Sangat Baik
32	Stasiun KIPM Bau-Bau	22	3.73	93.18	A	Sangat Baik
33	Balai KIPM Jakarta II	50	3.71	92.72	A	Sangat Baik
34	Balai KIPM Denpasar	264	3.70	92.5	A	Sangat Baik
35	Balai KIPM Surabaya I	90	3.69	92.16	A	Sangat Baik
36	Stasiun KIPM Aceh	12	3.66	91.44	A	Sangat Baik
37	Balai KIPM Lampung	29	3.65	91.28	A	Sangat Baik
38	Stasiun KIPM Medan II	100	3.63	90.83	A	Sangat Baik
39	Balai Besar KIPM Jakarta I	74	3.63	90.65	A	Sangat Baik
40	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	10	3.61	90.28	A	Sangat Baik
41	Balai KIPM Medan I	36	3.60	90.05	A	Sangat Baik



Gambar 3. 2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Periode Tahun 2024 Balai KIPM Lampung

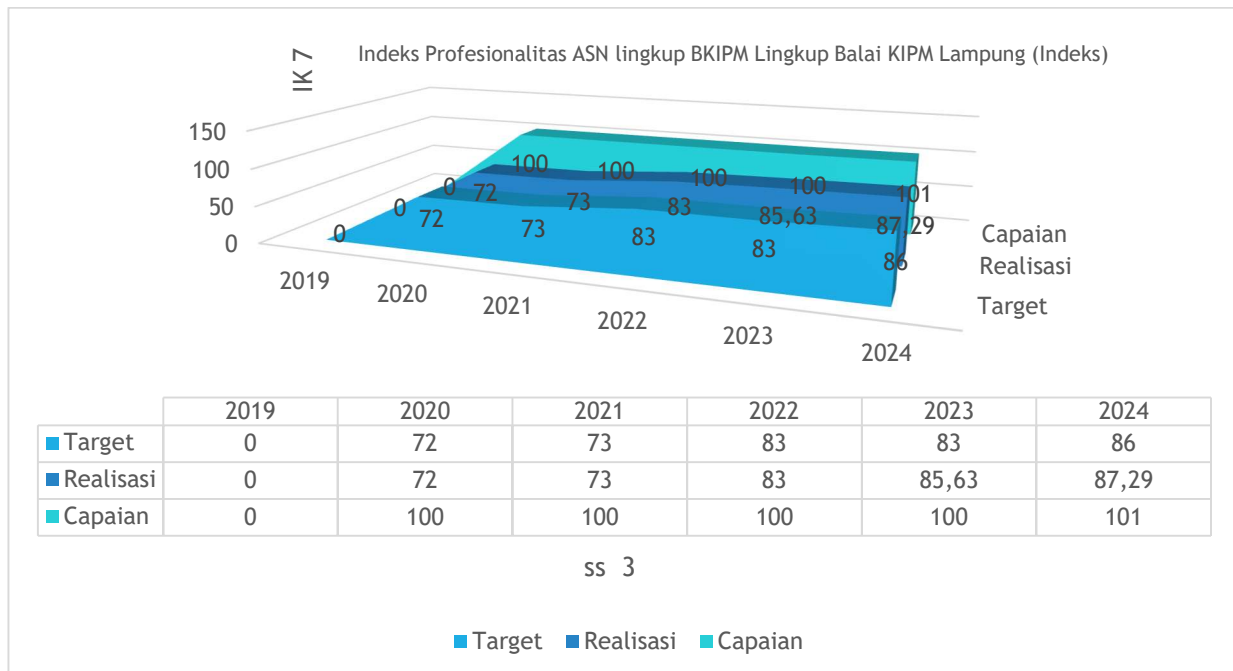
Indikator ini tahun 2024 dengan nilai target sebesar 84 dengan teralisasi sebesar 92.94% atau 3,65 indeks

Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan Kegiatan Penerapan Pelayanan Publik
- Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Balai KIPM Lampung.

IK 7 Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Data perbandingan antara target Tahun 2024 dan Realisasinya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.13



Tabel 3. 13 Target dan Realisasi IK 7 pada Tahun 2024

Untuk Membangun pegawai bersih dan Profesional dengan menegakan integritas. Pada Tahun 2024 Balai KIPM Lampung mempunyai target 86 pada

tahun 2024 telah terrealisasi sebesar 87,29 (Tinggi) dan data dapat diambil dari aplikasi Ropeg.KKP.go.id di Eselon I BPPMHKP.

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023												
Silakan ketik Nama Unit Kerja		Cari										
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	29	21.17	84.68 %	37.69	94.22 %	24.66	82.2 %	5	100 %	88.52	TINGGI
17	BALAI KIPM BANJARMASIN	13	20.54	82.16 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.54	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	28	21.11	84.44 %	36.19	90.47 %	25	83.33 %	5	100 %	87.29	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	11	20.82	83.28 %	38.48	96.2 %	25	83.33 %	5	100 %	89.3	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTIKONG	6	20.67	82.68 %	35.42	88.55 %	25	83.33 %	5	100 %	86.08	TINGGI
21	BALAI KIPM TANJUNG PINANG	10	20.6	82.4 %	36.75	91.88 %	25	83.33 %	5	100 %	87.35	TINGGI
22	BALAI KIPM TARAKAN	14	20.36	81.44 %	38.24	95.6 %	25	83.33 %	5	100 %	88.6	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	21	21.19	84.76 %	38.06	95.15 %	25.24	84.13 %	5	100 %	89.49	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	9	21.22	84.88 %	37.22	93.05 %	28.33	94.43 %	5	100 %	91.78	SANGAT TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	12	20	80 %	35.94	89.85 %	25	83.33 %	5	100 %	85.94	TINGGI
26	STASIUN KIPM PONTIANAK	16	20.56	82.24 %	35.62	89.05 %	21.88	72.93 %	5	100 %	83.06	TINGGI
27	STASIUN KIPM KENDARI	12	20.83	83.32 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.83	TINGGI
28	STASIUN KIPM BATAM	7	21.57	86.28 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	91.57	SANGAT TINGGI
29	STASIUN KIPM PADANG	12	19.67	78.68 %	37.92	94.8 %	25	83.33 %	5	100 %	87.58	TINGGI
30	STASIUN KIPM JAMBI	14	21.07	84.28 %	36.64	91.6 %	25.36	84.53 %	5	100 %	88.07	TINGGI

IK 8

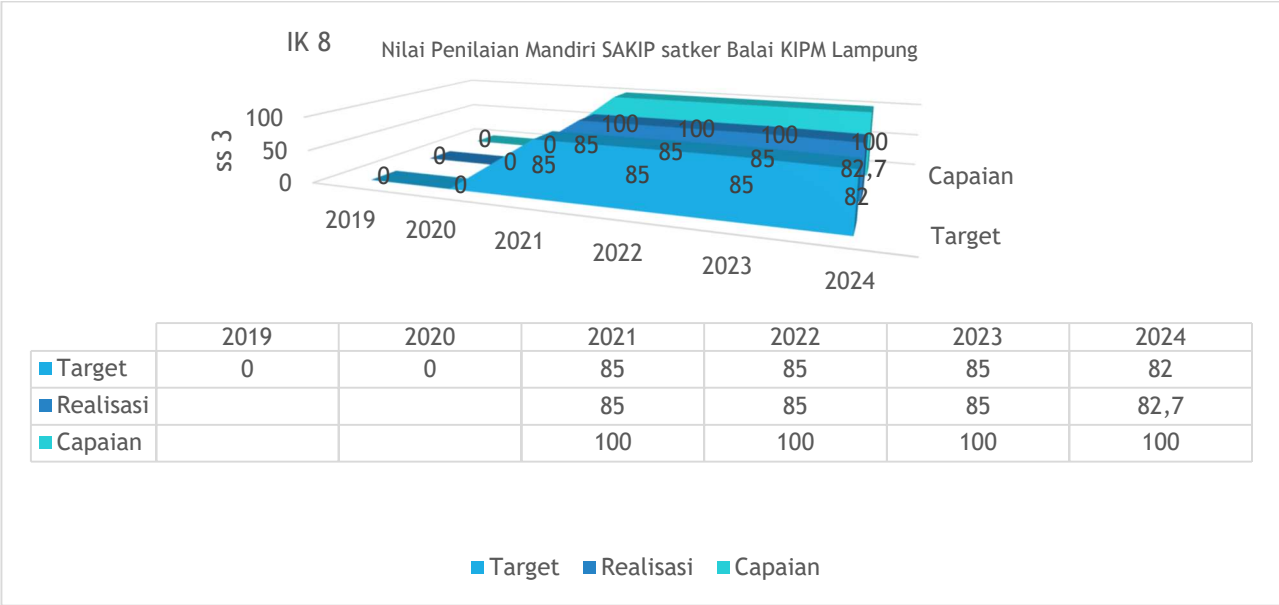
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP satker Balai KIPM Lampung

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Lampung adalah kegiatan/proses mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerjaku Balai KIPM Lampung dengan hasil/lampiran yang tersedia. Guna terwujudnya IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Lampung, maka Tim Pembahas/Penilai dari Biro Perencanaan – KKP ditugaskan untuk melakukan kegiatan mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerjaku Balai KIPM Lampung dengan hasil/lampiran yang tersedia.

Periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan. Penilaian Mandiri SAKIP Internal Lingkup BPPMHKP Tahun 2024 diselenggarakan oleh Sekretariat BPPMHKP. Penilaian rekonsiliasi kinerja mengacu pada Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Internal BPPMHKP dimana aspek penilaian meliputi 4

(empat) unsur/aspek, antara lain :

1. Aspek Kepatuhan
2. Aspek Kesesuaian
3. Aspek Ketercapaian
4. Aspek Ketepatan



Tabel 3. 14 Target dan Realisasi IK 8 pada Tahun 2024

Pada Tahun 2024 di IKU Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Lampung indikator ini ditargetkan 82% dan realisasinya sebesar 82,70%



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN BERDIRA TAMAN NEGARA 10
JAKARTA 10110, KODAK POS 4130 JKP 10041
TELEFON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513262
LAMPAH www.kkp.go.id SURTEL kkp@surinfor.kkp.go.id

2 Januari 2025

Nomor : B.12-BPPM-HKP.1/RC.610/12025
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPM-HKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPM-HKP;
2. Plt Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, BPPM-HKP;
3. Plt Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPM-HKP;
4. Kepala UPT Lingkup BPPM-HKP.

di tempat

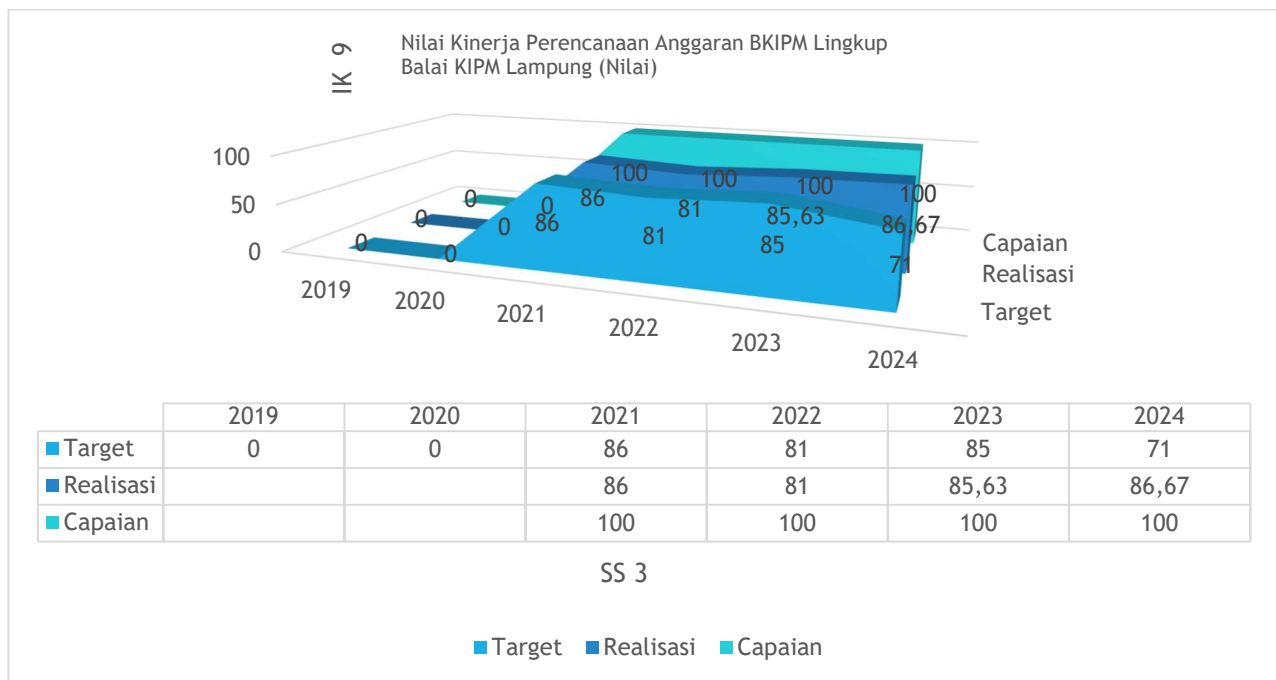
Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyusunan atas Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Depdik Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB Nomor B.65/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPM-HKP B.3977/BPPM-HKP.1/RC.610/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPM-HKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PedomanEvaluasiAKIP2024>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPM-HKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPM-HKP Tahun 2024 sebesar Nilai 82. Sebanyak 40 UPT (80,40%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 10 UPT (19,60%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPM-HKP adalah sebagai berikut :

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
1	Sekretariat BPPM-HKP	24,00	24,00	13,80	22,50	84,30	A
2	Pusat Manajemen Mutu	24,90	24,90	13,50	20,00	83,30	A
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	27,30	24,00	11,25	20,50	83,05	A
4	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	27,30	24,00	11,25	20,50	83,05	A
5	BBKPM Jakarta I	22,80	24,00	13,50	22,50	82,80	A
6	BBKPM Makassar	25,50	25,50	12,20	20,50	83,60	A
7	BKPM Denpasar	24,00	23,10	13,50	22,50	83,10	A
8	BKPM Surabaya I	24,00	22,20	13,50	22,50	82,20	A
9	BKPM Medan I	22,20	24,00	13,50	22,50	82,20	A
10	BKPM Balikpapan	24,00	24,00	12,75	21,25	82,00	A
11	BKPM Jayapura	22,50	23,70	12,80	18,00	74,20	BB
12	BKPM Jakarta II	23,70	23,70	13,50	21,25	82,15	A
13	BKPM Surabaya II	24,00	25,50	11,10	20,50	83,10	A
14	BKPM Mataram	24,00	27,00	12,60	20,00	83,60	A
15	BKPM Manado	24,90	24,00	12,00	22,50	83,40	A
16	BKPM Semarang	27,00	24,00	12,00	21,25	84,25	A
17	BKPM Banjarmasin	23,10	24,30	13,50	22,50	83,40	A
18	BKPM Lampung	22,20	27,00	13,50	20,00	82,70	A
19	BKPM Ambon	27,00	24,00	12,75	20,00	83,75	A
20	BKPM Enrekang	22,20	24,60	13,50	22,50	82,80	A
21	BKPM Tanjung Pinang	22,20	24,00	10,35	21,00	77,55	BB
22	BKPM Tarakan	24,00	24,00	12,00	22,50	82,50	A
23	BSUKI PM	24,00	27,00	13,50	20,00	84,50	A
24	SKPM Palembang	24,00	25,20	11,10	22,50	82,80	A
25	SKPM Bandung	26,10	25,20	12,60	19,75	83,65	A
26	SKPM Meruka	23,70	23,70	11,10	18,75	77,25	BB
27	SKPM Pontarak	22,20	25,50	13,50	22,50	83,70	A
28	SKPM Kendari	24,00	23,70	13,80	20,25	81,00	A
29	SKPM Batam	25,50	25,50	10,35	21,00	82,35	A
30	SKPM Padang	19,80	27,00	13,50	22,50	82,80	A
31	SKPM Jambi	24,00	25,50	12,60	21,25	83,35	A
32	SKPM Palu	24,00	24,00	12,60	22,50	83,10	A
33	SKPM Palangkaraya	24,00	24,00	12,30	22,50	82,80	A
34	SKPM Kupang	24,00	25,50	11,40	22,50	83,40	A
35	SKPM Pangkal Pinang	24,00	25,50	11,40	21,25	82,15	A
36	SKPM Ternate	22,20	27,00	12,60	22,50	84,30	A
37	SKPM Yogyakarta	26,10	24,60	11,85	20,50	83,05	A
38	SKPM Aceh	24,00	27,00	12,00	22,50	85,50	A
39	SKPM Gorontalo	24,60	24,00	12,75	21,25	82,60	A
40	SKPM Pekanbaru	22,80	27,00	12,60	22,50	84,90	A
41	SKPM Medan II	25,20	24,00	12,60	22,50	84,30	A

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan sebagai tindaklanjut ditetapkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah daerah. NKA merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Nilai diperoleh berdasarkan data input dan output yang dimasukkan oleh satuan kerja ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu. Data Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diunduh dari aplikasi SMART DJA Kemenkeu sebagai dasar capaian kinerja anggaran Balai KIPM Lampung yang akan diukur pada Tahun 2024 dengan target 71



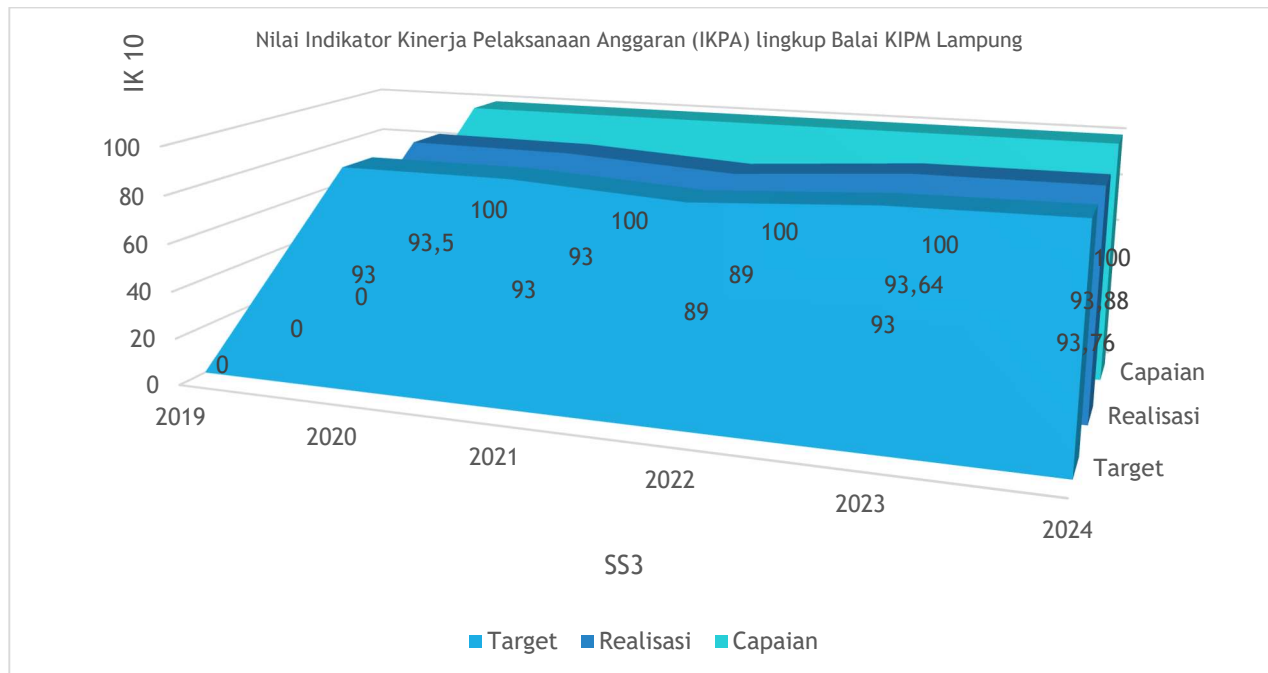
Tabel 3.18 Target dan Realisasi IK 9 pada Tahun 2024

Balai KIPM Lampung telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu Kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas, IKU Nilai Kinerja Anggaran memiliki angka target tahun 2024 adalah 71 dan telah terrealisasi 86,67 .

IK10

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)

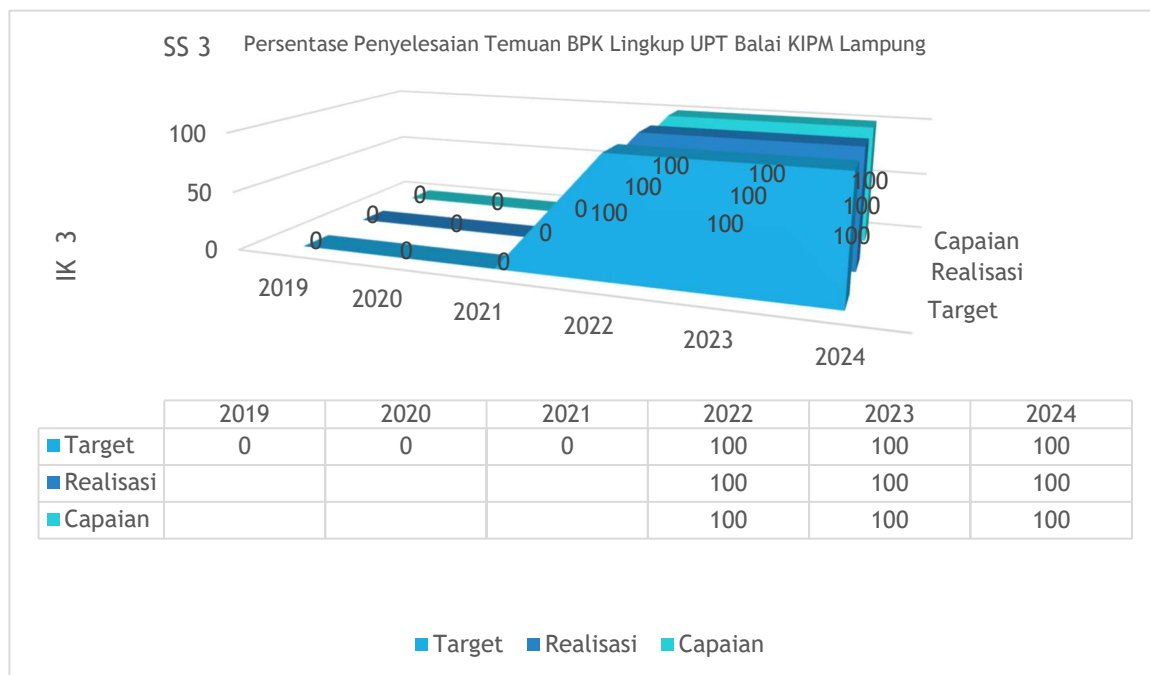
IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu : Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan Uang Persediaan, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Return SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Lampung pada Tahun 2024 ditargetkan berkategori “Baik” dengan nilai sebesar 93,76



Tabel 3. 17 Target dan Realisasi IK10 pada Tahun 2024

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup Balai KIPM Lampung didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. , IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memiliki angka target Tahun 2024 adalah 93,76 dan telah terrealisasi 93,88

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelesaian nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Lampung (%) adalah batas tertinggi Temuan Keuangan Hasil LHP BPK, yang dibuktikan dengan Berita Acara LHP Tim Pembahas/Penilai dari BPK. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Balai KIPM Lampung adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap LK Balai KIPM Lampung Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2024. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU/IK ini pada Tahun 2024 dengan target 100.



Tabel 3. 15 Target dan Realisasi IK 11 pada Tahun 2024

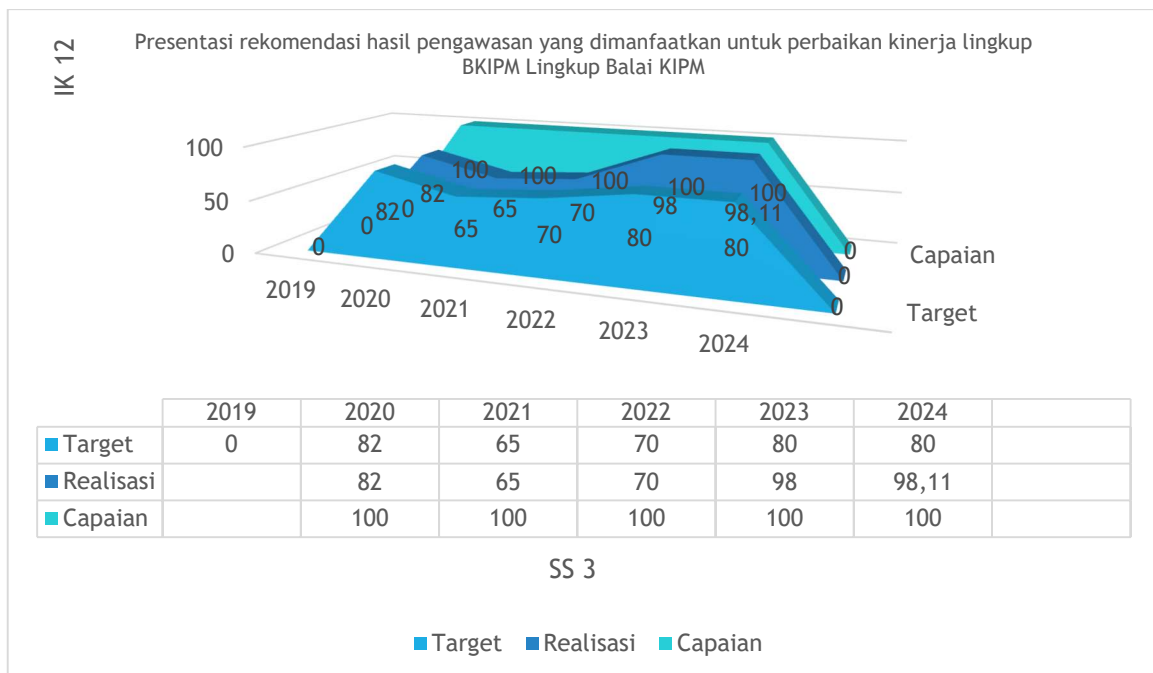
Keberhasilan capaian sasaran kegiatan tata kelola Pemerintahan yang baik mempunyai IKU penyelesaian temuan BPK memiliki angka target pada tahun 2024 adalah 100 dan dengan realisasi 100.

IK 12

Presentasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung(%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Lampung (%) adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Balai KIPM Lampung yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan dengan target selama setahun 80% rekomendasi ditindaklanjuti pada tahun 2024. Target pengukuran IKU ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2024.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Lampung telah ditindaklanjuti sangat baik oleh mitra eselon I. Data perbandingan antara target Tahun 2024 serta Realisasi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.16.



Tabel 3. 16 Target dan Realisasi IK 12 pada Tahun 2024

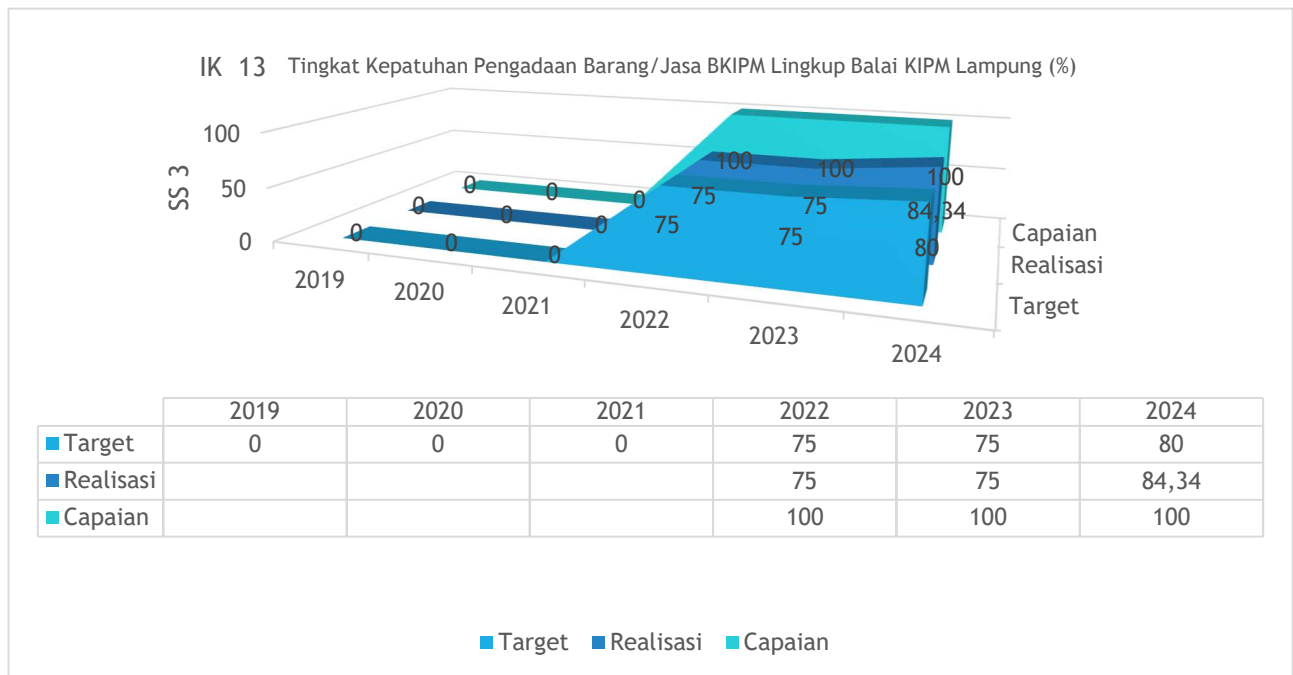
Keberhasilan Capaian Sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU rekomendasi hasil pengawasan yang di dan sudah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja memiliki angka target pada tahun 2024 adalah 80% dan teralisasi 98,11%.

IK 13

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%) merupakan nilai kepatuhan selama proses pengadaan Barang dan jasa selama kurun waktu satu tahun dimana datanya diambil dari Data Aplikasi SIRUP . Persentase tingkat kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah persentase kesesuaian pelaksanaan Pengadaan dengan aturan yang ditetapkan, pengukuran dengan target 80%.

IKU/IK ini diukur akhir Tahun 2024. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini adalah monitoring perencanaan penugasan dan evaluasi.

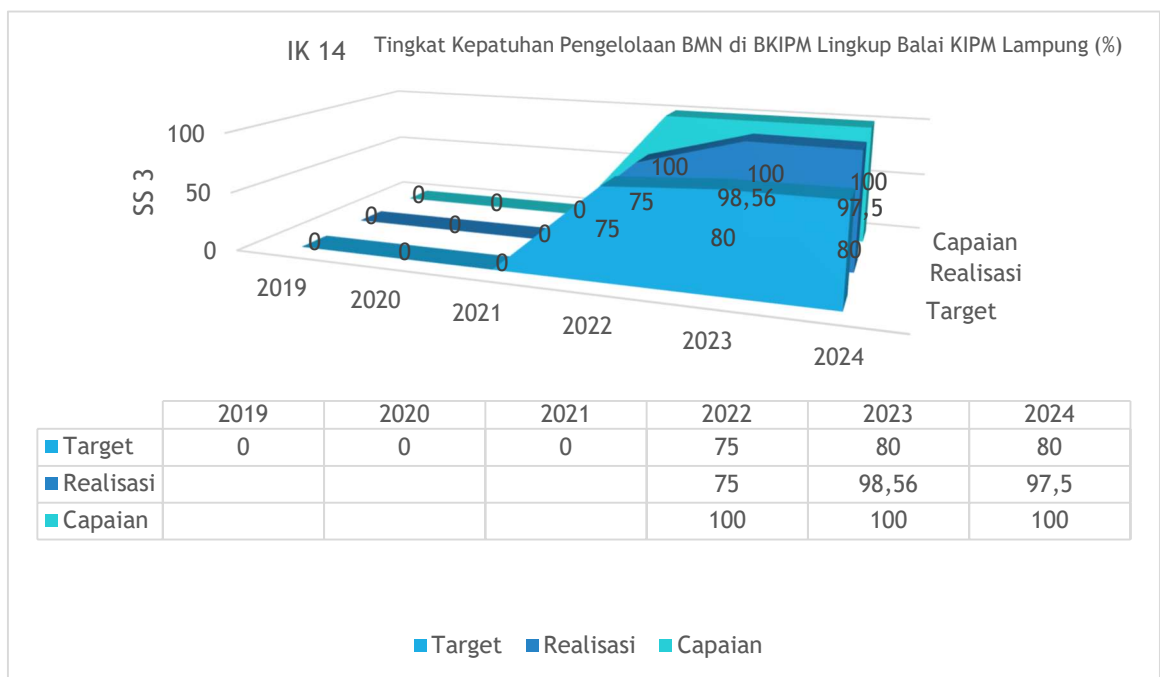


Tabel 3. 19Target dan Realisasi IK 13 pada Tahun 2024

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan IKU tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa memiliki angka target pada Tahun 2024 adalah 80% dan dengan realisasi sebesar 84,34%.

IK 14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%) merupakan nilai kepatuhan selama proses pengelolaan BMN selama kurun waktu satu tahun dimana datanya diambil dari Data Aplikasi SIMAK BMN. Data perbandingan antara target Tahun 2023 dan Target serta Realisasinya Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.20.



Tabel 3. 20 Target dan Realisasi IK 14 pada Tahun 2024

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN memiliki angka target pada tahun 2024 adalah 80 % dan dengan realisasinya 97,50%.

3.1. REALISASI ANGGARAN

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARA(Rp)
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
1.	Pengendalian Mutu	559.000.000
2.	7010	122.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.617.494.000
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2024		7.298.494.000

Tabel 3. 27 Data Anggaran

Alokasi anggaran BKIPM pada tahun anggaran (T.A) 2024 pada DIPA Awal sebesar Rp 11.594.909.000,- .dan Mengalami Revisi sampai 15 kali pada Tahun 2024

Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 7.621.363..000,- dan PNPB sebesar Rp 410.636.000,- Pada DIPA Tahun 2024 Nilai PNPB dari target awal Rp. Rp 1.100.000,000 menjadi Rp. 724.090.920,- atau telah tercapai 56 %.

URAIAN	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN			
PNBP	1.150.000.000	575.765.000	51.87 %
JUMLAH PENDAPATAN	1.150.000.000	575.765.000	51.87 %
BELANJA			
Belanja Pegawai	4.578.669.000	4.524.009.463	98,81%
Belanja Barang	2.719.825.000	2.575.564.338	94,70%
Belanja Modal	0	0	0%
Belanja Bansos	0	0	0%
JUMLAH BELANJA	7.298.494.000	7.099.573.801	97.27%

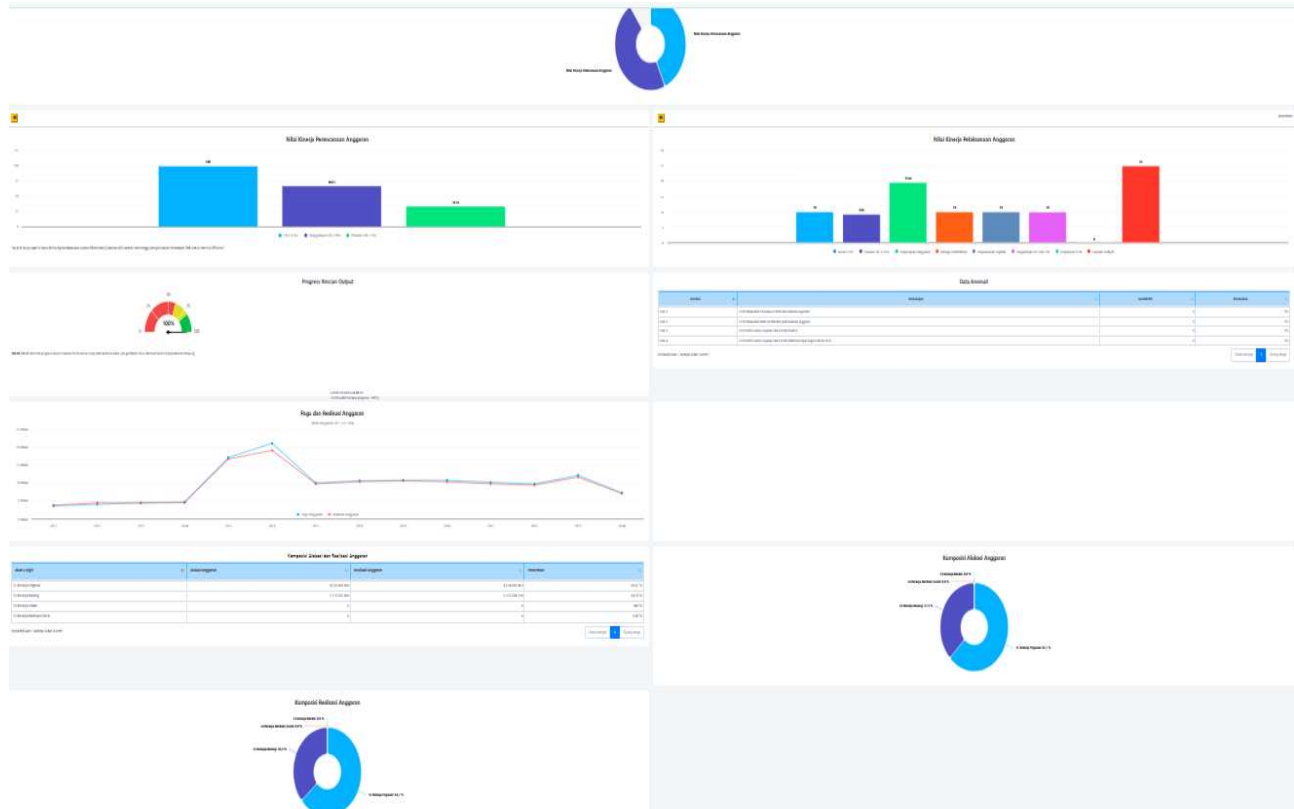
Tabel 3. 31 Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode TA 2024

3.2. EFISIENSI ANGGARAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Efesiensi Belanja Bidang Kementerian / Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 seluruh lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran.

Hal ini dilakukan untuk peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan anggaran pembangunan. Untuk itu BKIPM Lampung juga melaksanakan instruksi tersebut dengan penggunaan anggaran sehemat mungkin. Sumber penghematan bersumber dari penggunaan anggaran belanja non operasional,

Balai KIPM Lampung telah melakukan upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Disamping itu telah melakukan langkah-langkah streaming pertemuan, dengan melakukan video conprence agar bisa melakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas.





B. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN

PAGU anggaran Balai KIPM Lampung TA 2024 sebesar 8.031.999.000 Capaian realisasi anggaran Balai KIPM Lampung TA 2024 cukup baik yaitu mencapai Rp7.298.494.000,- atau 97,27% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.198,920,199 atau 2.73%. Secara lebih rinci, kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan data OM SPAN disajikan pada Lampiran.

OM-SPAN

halchat

STASIUN KARANTI...
T.A. 2024

EXCEL

PDF

FILTER

Realisasi Belanja Per Sumber Dana

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

NO	(KODE) SUMBER DANA	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	4.578.669.000	2.342.941.000	0	0	0	0	0	0	0	6.921.610.000	
REALISASI		4.524.009.463 (98.81%)	2.223.148.636 (94.89%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6.747.158.099 (97.48%)	
SISA		54.659.537	119.792.364	0	0	0	0	0	0	0	0	174.451.901	
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	376.884.000	0	0	0	0	0	0	0	376.884.000	
REALISASI		0 0.00%	352.415.702 (93.51%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	352.415.702 (93.51%)	
SISA		0	24.468.298	0	0	0	0	0	0	0	0	24.468.298	
GRAND TOTAL		PAGU	4.578.669.000	2.719.825.000	0	0	0	0	0	0	0	7.298.494.000	
		REALISASI	4.524.009.463 (98.81%)	2.575.564.338 (94.70%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	7.099.573.801 (97.27%)	
		SISA	54.659.537	144.260.662	0	0	0	0	0	0	0	198.920.199	

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TA 2024 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Balai KIPM Lampung telah melakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024.

Berdasarkan data capaian kinerja dari 14 IKU/IKS yang ada, sebanyak 14 (Empat Belas) IKU/IK telah dilakukan pengukurannya. Secara umum, dari 14 IKU yang dilakukan pengukuran telah mencapai target yang ditetapkan, hasil analisis

terbatas terhadap IKU/IK yang telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2024 serta dibandingkan terhadap target pada TA 2024.

D. ANALISIS PELAKSANAAN BELANJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA	
			REVISI	Rp	%Rp		%
1	Dukungan Manajemen	9.034.102.000,-	6.617.494.000,-	6.483.624.697	98,01 %	174.451.901	1.99%
2	Pengendalian Mutu	409.450.000,-	559.000.000,-	498.451.678	89,17%	60.548.324	10.83%
3	7010	1.516.500.000,-	122.000.000	115.497.428	94.67%	6.502.572	5.33%
TOTAL		11.594.909.000	7.298.494.000	7.099.573.801	97.27%	198.920.199	2,73%

Tabel 3.33 Perkembangan Realisasi dan Sisa Anggaran Balai KIPM Lampung per 31 Desember 2024

Balai KIPM Lampung TA 2024 melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu 1. (3987) Dukungan Manajemen Internal lingkup Badan Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.6.617.494.000,- 2.(3989) Pengendalian Mutu Rp. 559.000.000,- dan 3, (7010) Rp. 122.000.000,- Sebagian besar kegiatan operasional Balai KIPM Lampung ditampung dalam 3 kegiatan sedangkan untuk Gaji dan keperluan Kantor di Tampung dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup Balai KIPM Lampung Berikut ini disampaikan Data Perkembang Realisasi dan Sisa Anggaran Balai KIPM Lampung per Bulan tahun 2024.

Data realisasi yang tertera di atas sebesar 7.099.573.801,- (Pagu) adalah data yang telah di SPJ-kan ke KPPN dan telah terbit SP2D, sehingga ada Sisa Rp. 198.920.199,-. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan di Balai KIPM Lampung telah mencapai 97,27%.. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian kinerja anggaran maupun kinerja organisasi yang telah ditetapkan cukup efektif dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2024 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Pengelola Kinerja Balai KIPM Lampung melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Balai KIPM Lampung Triwulan IV Tahun 2024 secara keseluruhan dinilai baik dengan skor kinerja sebesar 114,81.
2. Sebanyak 14 (Empat Belas) IKU dan IK yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024 ada yang telah mencapai target bahkan melebihi target dan tidak ada yang dibawah Target yang ditetapkan.
3. Capaian realisasi anggaran Balai KIPM Lampung TW IV TA 2024 cukup baik yaitu mencapai Rp. 7.099.573.801,- atau 97,27% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 198.920.199,- atau 2.73%.

B. PERMASALAHAN

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian target kinerja Level 3 Balai KIPM Lampung. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan atau kondisi yang belum sesuai harapan pada pencapaian kinerja Level 3 Balai KIPM Lampung yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja Balai KIPM Lampung:

B. LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Balai KIPM Lampung akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyesuaikan agenda untuk penyelesaian target Realisasi IKU yang Sudah tercapai, serta meningkatkan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kegiatan penanggungjawab kegiatan secara melekat

